



PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sabita Nayla Riskia¹⁾, Mega Jihan Syahirah²⁾, Indah Prabawati³⁾, Firre An Suprpto⁴⁾.

¹S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

email: 25040674213@mhs.unesa.ac.id

²S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

email: 25040674199@mhs.unesa.ac.id

³S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

email: indahprabawati@unesa.ac.id

⁴S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

email: firresuprpto@unesa.ac.id

*Penulis Korespondensi: 25040674213@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This study examines the problems of public policy in improving the quality of education in Indonesia. Education is an important sector in national development because it is closely related to the formation of quality human resources. However, various education policies implemented by the government still face obstacles in their implementation. This research uses a qualitative approach with a literature study method by reviewing books, scientific journals, policy documents, and relevant official reports. The analysis uses George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the main problems in education policy implementation are unclear communication between policymakers and implementers, unequal human and financial resources, low commitment of policy implementers, and a bureaucratic structure that is still complex. These factors cause education policies to not fully achieve the expected goals. Therefore, improving policy implementation through strengthening communication, equalizing resources, increasing implementer capacity, and bureaucratic reform is necessary so that education quality improvement can be achieved more effectively..*

Keywords: *public policy, policy implementation, education quality, Indonesia, Edwards III*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji permasalahan kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan erat dengan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang relevan. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah komunikasi yang kurang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana, sumber daya manusia dan keuangan yang tidak merata, rendahnya komitmen pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang masih kompleks. Faktor-faktor ini menyebabkan kebijakan pendidikan tidak sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan implementasi kebijakan melalui penguatan komunikasi, pemerataan sumber daya, peningkatan kapasitas pelaksana, dan reformasi birokrasi diperlukan agar peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai secara lebih efektif.

Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, kualitas pendidikan, Indonesia, Edwards III

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, serta membentuk akhlak dan memperkuat kepribadian seseorang. Dalam kehidupan manusia, pendidikan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Hal ini karena berbagai aktivitas manusia tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan. Secara umum, pendidikan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sementara itu, pendidikan informal berlangsung di lingkungan keluarga atau masyarakat tanpa terikat oleh lembaga atau organisasi tertentu. Adapun pendidikan nonformal adalah pendidikan yang terorganisasi namun berada di luar sistem pendidikan formal. Dalam pembahasan ini, fokus utama diarahkan pada pendidikan formal.

Menempuh pendidikan formal dengan bersekolah pada dasarnya merupakan upaya manusia dalam membentuk karakter yang unggul guna meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas. Melalui pendidikan, setiap individu diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat mencapai level kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, manusia dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari sejak lahir hingga dewasa. Manusia senantiasa mengalami proses pendidikan yang membantu mereka menemukan arah, tujuan, serta makna hidupnya (Habsy et al., 2024). Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Selain itu pada hakikatnya, pendidikan merupakan sarana untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan yang akan membentuk cara pandang dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan. Tanpa pendidikan, manusia akan mengalami keterbatasan dalam pengembangan diri maupun peningkatan kualitas hidup. Di Indonesia, perkembangan pendidikan juga mengalami berbagai dinamika, terutama sejak era reformasi yang

membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Meskipun demikian, berbagai persoalan dalam dunia pendidikan masih terus muncul, baik yang berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan pendidikan, maupun dari segi sumber daya itu sendiri (Putri Hafidati, 2020).

Pendidikan sendiri merupakan aspek mendasar yang diakui penting oleh setiap negara dan bangsa. Kualitas pendidikan yang dimiliki suatu negara sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan kemajuan negara tersebut. Apabila kualitas pendidikan rendah, maka negara tersebut berpotensi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan negara lain. Di Indonesia, hak untuk memperoleh pendidikan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi setiap warga negara.

Tercapainya tujuan pendidikan juga tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Kebijakan pendidikan pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui kebijakan pendidikan, suatu negara berupaya mencapai tujuan nasional, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kekurangan tenaga pendidik di beberapa daerah utamanya di daerah pelosok, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, serta adanya kebijakan pendidikan namun dalam implementasinya berjalan kurang optimal. Akibatnya, sebagian masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan juga sering merasa terbebani dengan adanya kebijakan baru karena kurangnya pemahaman mengenai sistem pendidikan yang diterapkan. Namun, masih banyak ditemukan berbagai keluhan dari para pendidik maupun pimpinan sekolah terkait dengan manajemen, birokrasi, serta administrasi yang dinilai belum berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan serta rendahnya kualitas lulusan juga menjadi tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (Pangestua et al., 2025).

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan sistem pendidikan di Indonesia serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam praktiknya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat menjadi pedoman yang memberikan kejelasan arah bagi para penyelenggara pendidikan dalam menjalankan proses pendidikan secara lebih efektif.

Sistem pendidikan nasional saat ini juga dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian agar mampu menciptakan proses pendidikan yang lebih demokratis, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan mudah. Kompleksitas kondisi sosial, budaya, dan kebijakan yang beragam menjadikan pengelolaan pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan memegang peranan penting dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar mampu mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk mengatur pengelolaan pendidikan, seperti penggunaan anggaran, guru, dan fasilitas sekolah, agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Nyatanya keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses perumusannya, melainkan juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara nyata dalam praktik pendidikan. Tanpa implementasi yang baik, kebijakan yang telah dirancang tidak akan memberikan dampak yang berarti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia serta menganalisis perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kebijakan

Secara umum, kebijakan (*policy*) digunakan untuk menggambarkan tindakan atau keputusan yang diambil oleh seorang aktor, seperti pejabat pemerintah, kelompok, atau lembaga tertentu dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan menjadi pedoman atau arah bagi tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut George C. Edwards III dalam teori implementasi kebijakan (1980), implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Hal ini karena kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan mencapai tujuan apabila pelaksanaannya tidak dipersiapkan dan direncanakan secara matang.

Selanjutnya, menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (2001), implementasi kebijakan adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah, maupun kelompok swasta yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Sementara itu, Noeng Muhadjir menyatakan bahwa kebijakan merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip keadilan. Dalam suatu kebijakan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat, terwujudnya keadilan hukum dan sosial, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta terjaminnya pembangunan yang berkelanjutan (Mahardika et al., 2024).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan pedoman umum yang mengarahkan tindakan dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Kebijakan juga berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti oleh para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Dengan demikian, kebijakan menjadi salah satu instrumen penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edwards III (1980 dalam Mubarok et al., 2020), studi mengenai implementasi kebijakan merupakan bagian yang sangat penting dalam administrasi publik. Implementasi kebijakan adalah tahap yang menghubungkan antara proses perumusan kebijakan dengan dampak atau konsekuensi kebijakan tersebut bagi masyarakat. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Agar implementasi berjalan efektif, para pelaksana kebijakan harus memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, informasi atau perintah terkait pelaksanaan kebijakan harus disampaikan kepada pihak yang tepat. Selain itu, pesan yang disampaikan harus jelas, akurat, dan konsisten sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah dan kualitas pelaksana kebijakan yang mampu menjalankan program serta menjangkau kelompok sasaran. Sementara itu, sumber daya finansial berkaitan dengan ketersediaan dana yang diperlukan untuk menjalankan program atau kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara efektif dan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai.

Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan integritas para pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen tinggi dan sikap jujur akan lebih mampu menjalankan kebijakan secara konsisten meskipun menghadapi berbagai hambatan. Selain itu, sikap yang demokratis dari pelaksana kebijakan juga penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan serta mengurangi penolakan dari kelompok sasaran.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja dan organisasi pelaksana kebijakan. Salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi adalah adanya prosedur kerja yang jelas, seperti standar operasional prosedur (SOP). SOP berfungsi sebagai pedoman bagi para

pelaksana dalam menjalankan program kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis fenomena kebijakan pendidikan berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi dari lembaga yang berkaitan dengan bidang pendidikan, data ini kami temukan dari web dan jurnal yang dipublikasikan di internet. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan laporan pendidikan nasional dan berbagai publikasi resmi yang membahas kondisi serta kebijakan pendidikan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta peningkatan kualitas pendidikan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Data tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan publik di bidang pendidikan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Komunikasi Kebijakan

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, komunikasi kebijakan seringkali belum berjalan secara efektif dan merata. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian pemahaman antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan praktik di lapangan.

Penelitian dalam jurnal *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan* menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif dan penyampaian informasi yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan (Zuanda et al., 2024). Kurangnya sosialisasi menyebabkan guru dan tenaga kependidikan tidak memahami secara utuh isi kebijakan, sehingga implementasi menjadi tidak optimal.

Selain itu, dalam studi mengenai implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka juga ditemukan bahwa kebijakan belum sepenuhnya diterapkan secara efektif karena kurangnya pemahaman dan koordinasi antar pelaksana (Alimuddin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak konsisten dan tidak merata dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di lapangan. Dengan demikian, komunikasi kebijakan yang efektif harus mencakup kejelasan informasi, konsistensi pesan, serta distribusi informasi yang merata agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan.

4.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan pendidikan, yang mencakup sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana. Dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek ini.

Penelitian oleh (Afriantoni et al., 2025) dalam jurnal *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan* menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran,

kompetensi tenaga pendidik, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Kurangnya sumber daya menyebabkan kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan antar daerah, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Studi oleh (Zuanda et al., 2024) juga mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kesenjangan antar sekolah menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Tabel 1. Kondisi Ruang Kelas di Indonesia

Jenjang Pendidikan	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat
SD / MI	39,70%	49,49%	10,81%
SMP / MTs	50,33%	43,50%	6,17%
SMA / MA	60,27%	33,56%	6,17%
SMK / MAK	62,15%	31,70%	6,15%

Sumber : Kemendikdasmen Tahun 2024

Kondisi infrastruktur sekolah di Indonesia tahun 2024 menunjukkan ketimpangan antar jenjang. Sekolah Dasar (SD) menjadi titik paling kritis dengan hanya 39,7% ruang kelas yang berkondisi baik, sementara sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Sebaliknya, kondisi fisik sekolah semakin stabil di jenjang yang lebih tinggi. SMP memiliki 50,3% kelas layak, disusul SMA dan SMK yang mencapai angka di atas 60%. Singkatnya, fasilitas pendidikan menengah cenderung lebih terawat dibandingkan pendidikan dasar yang memerlukan prioritas rehabilitasi mendesak.

Dalam konteks kebijakan Program Indonesia Pintar (KIP), keterbatasan sumber daya ini juga mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai pemerataan pendidikan. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa distribusi bantuan dan pengelolaan program masih menghadapi kendala administratif dan teknis (W et al., 2023)

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan memerlukan penguatan sumber daya secara menyeluruh, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta pemerataan distribusinya di seluruh wilayah Indonesia.

4.3 Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan mencakup komitmen, integritas, serta kesiapan dalam menjalankan kebijakan. Faktor ini sangat menentukan keberhasilan implementasi karena pelaksana kebijakan merupakan aktor utama di lapangan.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, masih ditemukan adanya resistensi terhadap perubahan kebijakan, terutama terkait perubahan kurikulum dan sistem pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, beban kerja yang tinggi, serta minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik.

Penelitian tentang implementasi pendidikan inklusif menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah ditetapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala akibat kurangnya kesiapan dan pemahaman pelaksana di sekolah (Irmawati et al., 2024) Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan kesiapan pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah (Afriantoni et al., 2025)

Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme pelaksana kebijakan melalui pelatihan, pendampingan, serta pemberian motivasi dan insentif agar mereka dapat menjalankan kebijakan dengan lebih optimal.

4.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi, prosedur kerja, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, struktur birokrasi seringkali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Prosedur administrasi yang panjang dan kompleks menyebabkan lambatnya pelaksanaan program pendidikan. Selain itu, adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menyebabkan kurangnya koordinasi dalam implementasi kebijakan.

Penelitian dalam jurnal *Penerapan Kebijakan Pendidikan di Indonesia* menunjukkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, tahap implementasi seringkali menghadapi kendala dalam penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang efektif (Sari et al., 2023) Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat keberhasilan kebijakan.

Selain itu, kajian sistematis tentang kebijakan pendidikan di Indonesia juga menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan seringkali tidak diikuti dengan konsistensi implementasi di lapangan (Daud, 2024) Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem birokrasi dan koordinasi antar lembaga.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan koordinasi antar instansi, serta kejelasan pembagian kewenangan agar implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif.

4.5 Keterkaitan Antar Faktor dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan

Keempat faktor dalam implementasi kebijakan tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan pelaksana kebijakan tidak memahami tugasnya, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap (disposisi) dan pemanfaatan sumber daya. Begitu pula dengan keterbatasan sumber daya yang dapat memperburuk implementasi kebijakan, meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika kebijakan publik dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia terletak pada belum optimalnya implementasi kebijakan. Hal ini berdampak pada belum tercapainya tujuan pendidikan nasional secara maksimal.

Sejalan dengan itu, penelitian (Zuanda et al., 2024) menegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks dan dinamis,

yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak serta evaluasi yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif melalui peningkatan kualitas komunikasi kebijakan, pemerataan sumber daya, penguatan komitmen pelaksana, serta reformasi birokrasi. Jika keempat aspek tersebut dapat diperbaiki secara simultan, maka kebijakan pendidikan di Indonesia akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa problematika kebijakan publik dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia lebih banyak terjadi pada tahap implementasi kebijakan. Meskipun berbagai kebijakan pendidikan telah dirumuskan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal.

Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, masih terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi kebijakan yang menyebabkan perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana. Dari aspek sumber daya, keterbatasan tenaga pendidik, serta distribusi yang belum merata menjadi hambatan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Selanjutnya, dari aspek disposisi, masih ditemukan kurangnya komitmen dan kesiapan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program pendidikan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, prosedur yang kompleks dan koordinasi yang belum optimal turut menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi sangat

bergantung pada efektivitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, perbaikan dalam aspek implementasi menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Komunikasi Kebijakan

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan melalui sosialisasi yang lebih intensif, jelas, dan merata kepada seluruh pelaksana kebijakan, khususnya tenaga pendidik. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan di lapangan.

2. Penguatan dan Pemerataan Sumber Daya

Pemerintah perlu melakukan pemerataan distribusi tenaga pendidik serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, pengelolaan anggaran pendidikan juga perlu dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Peningkatan Kompetensi dan Komitmen Pelaksana Kebijakan

Diperlukan pelatihan, pendampingan, serta pemberian motivasi bagi tenaga pendidik dan pelaksana kebijakan agar memiliki pemahaman yang baik serta komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan pendidikan.

4. Reformasi Struktur Birokrasi

Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan prosedur birokrasi serta meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien.

5. Evaluasi Kebijakan Secara Berkala

Diperlukan evaluasi kebijakan pendidikan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar kebijakan

yang diterapkan dapat memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Afriantoni, Agustina, D., Agustian, K., & Olyvia, A. (2025). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar*. 3, 309–317.
- Alimuddin, J. (2023). *IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH DASAR IMPLEMENTATION OF KURIKULUM MERDEKA IN ELEMENTARY*. 4(02), 67–75.
- Daud, Y. M. (2024). *Perkembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia : A Systematic Leterature Review*. 13(01), 115–131.
- Habsy, B. A., Putri, M. A., Nadiroh, N. L., & Kartika, A. B. P. (2024). *Hakikat Manusia dan Keterkaitannya dengan Pendidikan Serta Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat Life Long Education*. 2(1), 326–342.
- Irmawati, Rahmawati, R., & Rusliandy. (2024). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*. 9(1), 168–184.
- Mahardika, F., Ubaidillah, L., Jember, U. M., Jember, K., Timur, J., Regent, J., & People, H. (2024). *KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN*. 4.
- Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). *Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis : Exploration of George Edward III , Marilee S Grindle , and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle*. 5(1), 33–38.
- Pangestua, M. R., Azizb, M. A., & Alic, R. (2025). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Mutu Layanan Pendidikan Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*. 2(1), 509–513.
- Putri Hafidati. (2020). *PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA*. V(1), 40–48.
- Sari, S. P., Ritonga, R. R., & Sirait, B. A. (2023). *Penerapan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. 1(5).
- W, P. F., Marcelia, D., Wulandari, S. T., G, A. R., & Rahmawati, A. (2023). *Implementasi kebijakan program indonesia pintar (kip) dalam pemerataan akses pendidikan di kota bandar lampung*. 3, 2022–2026.
- Zuanda, S., Fahrezi, D. W., Rised, G. F., & Syaifuddin, M. (2024). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan*. 8, 27207–27218.